

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Himmawan DN, Djoko Wahjudi. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Hal.189-205.
- Effendi, A. 2011. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat YKPN.
- http://www.bukittinggikota.go.id/index.php?class=text&file_id=105, diakses tanggal 17 september 2016 pukul 21:22
- <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=1375>, diakses tanggal 22 Agustus 2016 pukul 11:12
- <https://bukittinggikota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/2>, diakses tanggal 24 november 2016 pukul 9:17
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta
- . 2011. *Perpajakan*. ANDI: Yogyakarta
- Mustika, W. A. dan Farida, I. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 6.
- Octovido, I. dkk. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Priandini, O. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang Panjang*. Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Resmi,S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat:Jakarta Selatan.
- Rosa, Y. D. 2012. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.*e-Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar*.Vol 4 No.2
- Sekaran,U. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siregar, A. 2009. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*.Fakultas Ekonomi, Universitas Sumater Utara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

